



## COMMITTEE OF INTERNATIONAL CONFERENCE



### CELEBRATING ISLAMIC THOUGHT FOR PEACE (SALAM), HAPPINESS (SA'ADAH), AND PROSPERITY (SAKINAH)

Sekretariat : Fakultas Syari'ah IAIN-SU Jl. Willem Iskandar Psr V Barat, Medan Estate -20371-

No : 71/Pan.Conference/10.11/2012  
Attachment : 2 eks  
Subject : Invitation as Speaker

Dear  
Dr. M. Ridwan M.Ag.  
IAIN-SU Medan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Lecturers of Islamic Thought Study in National Institute of Islamic Studies of North Sumatera (IAIN-SU) united in Lembaga Bait al-Hikmah in collaboration with Fulbright Specialist Grantee, Eric Winkel, and other international Islamic Studies scholars, will held an International Conference entitled "*Celebrating Islamic Thought for Peace, Happiness, and Prosperity*" (merayakan kekayaan pemikiran Islam untuk mendulang Kedamaian, Kebahagiaan, dan Kesejahteraan).

Eric Winkel is an American Muslim scholar, who concentrates on the practical aspects of the thought of Ibn 'Arabi – a sufi thinker who had been posited as the reference for the universal peace and interreligious harmony and cooperation. In the mean time, Winkel is working the project of translating the 14 volumes *Futuhat al-Makkiyyah* of Ibn 'Arabi.

The conference, supported by institutions such as Sahaja Organizer International (SOI), Utul 'Ilma Course (UIC), Pusat Studi Wanita IAIN (PSW), and Pusat Informasi Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU), has some objectives. First, to build networking between local, national and international Islamic Thought Scholars. Second, to draw a plan of research programs on Islamic Thought Studies in international level. Third, to produce a publication in the form of *proceeding* and journal. Fourth, to create MOU on Ibn 'Arabi Studies and Manifestations.

In order that the conference be successful, we insistedly request your willingness to speak at the conference scheduled on :

Day/Date : Wednesday/28 November 2012  
Hour : 8.00 – 16.30  
Place : IAIN Hall, Jalan Willem Iskandar Psr V Barat,  
Medan.

We are looking forward your respond as soon as possible.

Steering Committee

Prof. Dr. Hasan Bakti Nst. M.A  
The Head of Philosophy Department,  
Graduate Faculty, IAIN-SU



Medan, 10 November 2012  
Organizing Committee

Dr. Nurasiah M.A  
Coordinator



# Certificate

## INTERNATIONAL CONFERENCE

This is to certify that

Dr. M. Ridwan M.Ag

(IAIN-SU MEDAN)

*Has Presented Paper :*

"Sistem Moneter Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Islam"

CONFERENCE THEME: CELEBRATING ISLAMIC THOUGHT FOR PEACE (SALAM),  
HAPPINESS (SA'ADAH), AND PROSPERITY (SAKINAH)

المؤتمر الدولي لدراسة الفكرية الاسلامية  
لنيل السلامة والسعادة والسكينة

### SPEAKER:

- Prof. Dr. Nur Ahmad Fadil Lubis M.A.  
(Rector of IAIN -SU)
- Prof. Dr. Noor Sakhrirah Maat Akhir  
(Fakulti Humanities, USM Pahang, Malaysia)
- Prof. Dr. Azizan Sabjan  
(Fakulti Humanities, USM Pahang, Malaysia)
- Prof. Dr. Amany Lubis  
(UIN Jakarta)

KEYNOTE SPEAKER

DR. ERIC WINKEL

University of South Carolina, New Mexico  
Quaid-i-Azam University, Pakistan

IAIN-SU 29-30 NOVEMBER 2012

Keynote Speaker

*Eric Winkel*

DR. Eric Winkel

Rector of IAIN-SU

Organizing Committee

*Nur A. Fadhil Lubis*

Prof. DR. Nur A. Fadhil Lubis, MA DR. Nurasiah, MA





## SISTEM MONETER YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM<sup>1</sup>

Oleh : M. Ridwan<sup>2</sup>

### Abstraksi

*Monetary policy can not be separated from economic activities. Transmission of this policy is expected to increase the economic growth of society. But, conventional monetary policy and its instruments has been doubted a way for solving economic problems. This paper will briefly explain the monetary policy both from the conventional and islamic perspective.*

**Keywords:** Monetary policy, Central Bank, Islamic Economics, Dinar Dirham, Crisis, money supply

### A. Pendahuluan

Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 lalu menyebabkan banyak kalangan semakin mempertanyakan eksistensi sistem kapitalis yang digunakan oleh negara-negara di dunia ini. Kapitalis yang diwakili oleh Amerika Serikat semakin menampakkan dirinya sebagai sebuah sistem yang lemah dan bermasalah. Hal ini didukung oleh begitu rentannya negara-negara penganut sistem ini dari terpaan badai ekonomi.<sup>3</sup>

Menyikapi kondisi krisis global dunia saat ini dan kaitannya dengan sistem kapitalis, berbagai kalangan terbagi menjadi beberapa 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama menyatakan bahwa sistem kapitalis sudah layak untuk digantikan dengan sistem lain. Menurut mereka sistem ini terbukti gagal

---

<sup>1</sup>Disampaikan pada International Conference "Celebrating Islamic Thought for Peace, Happiness and Prosperity, 28 November 2012, IAIN Hall

<sup>2</sup> Penulis adalah Dosen Ekonomi Islam UINSU Medan.

<sup>3</sup> Pada tahun 2008, dunia pernah dihadapkan pada krisis keuangan global yang dimulai dari Amerika Serikat. Krisis keuangan yang berawal dari krisis *subprime mortgage* itu merontokkan sejumlah lembaga keuangan AS raksasa seperti Lehman Brothers termasuk juga pelaku bisnis raksasa lainnya seperti Washington Mutual Bank, perusahaan asuransi terbesar di dunia American International Group (AIG) dan perusahaan sekuritas raksasa Merrill Lynch, Morgan Stanley dan Goldman Sachs. Pemerintah AS terpaksa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Para investor mulai kehilangan kepercayaan, sehingga harga-harga saham di bursa-bursa utama dunia pun rontok, termasuk Indonesia. Lihat, [www.niriah.com](http://www.niriah.com)



mensejahterakan manusia dianggap bertanggung jawab atas terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan di dunia ini.<sup>4</sup>

Kelompok kedua, lebih bersikap moderat dengan mengatakan bahwa sistem kapitalis saat ini memang memunculkan ketimpangan dan ketidakadilan, namun untuk menggantikan sistem ini dengan sebuah sistem baru tentu memerlukan kerja keras dan terkesan mustahil. Bagi kelompok ini, lebih baik memberikan sentuhan-sentuhan baru bagi kapitalis dengan memperkuat nilai etika moral sistem ini. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa sistem kapitalis sendiri pada dasarnya telah mengalami metamorfosis sejak dicetuskan oleh Adam Smith tahun 1776 di Inggris dengan bukunya *Welfare of Nation*.<sup>5</sup>

Menariknya, sistem ekonomi Islam yang selama ini dianggap sebuah sistem baru dan terus melakukan perbaikan dan pengembangan konsep, mau tidak mau juga dihadapkan pada dua kelompok di atas. Para pengusung ekonomi Islam juga dihadapkan pada pertanyaan apakah sistem ekonomi Islam harus muncul sebagai sebuah sistem tanpa terikat dengan ajaran kapitalis sama sekali, atau dengan kata lain, apakah sistem ekonomi Islam harus muncul dengan corak dan karakternya sendiri, atau apakah ekonomi Islam justru lebih diarahkan pada sebuah gerakan berupa upaya memodifikasi sistem kapitalis dengan memberikan ruh ketuhanan dan nilai-nilai moral yang kuat bahkan mutlak dilaksanakan.<sup>6</sup>

Makalah ini mengkaji konsep kebijakan moneter yang merupakan salah satu konsep ekonomi yang diharapkan dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat. Dalam pembahasan makalah ini akan mencoba

---

<sup>4</sup> Salah satunya adalah Masudul Alam Choudhury yang mengatakan bahwa ekonomi Islam, lembaga perbankan dan keuangan Islam saat ini masih terjebak ke dalam doktrin-doktrin neo klasik dan neo liberal. Penjelasan Masudul Alam Choudhury ini dapat dilihat dalam tulisannya, *Islamic Economics and Finance Where Do They Stand*, dalam, Muhammad Iqbal, et,all, *Advances of Islamic Economics and Finance : Proceeding of 6<sup>th</sup> International Conference on Islamic Economics and Finance*, (Jeddah, IRTI : 2007), hal. 75-94

<sup>5</sup> Di antara tokoh yang mendukung gagasan ini adalah Umer Chapra. Penjelasan ini dapat dilihat pada, Chapra. M. Umer, *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, (Leicester, UK : Islamic Foundation, 2000), hal. 130

<sup>6</sup> Pembahasan tentang kedudukan ekonomi Islam di tengah hegemoni sistem kapitalis memunculkan aliran mazhab ekonomi Islam, yaitu : (1) Mazhab Iqtisaduna yang diprakarsai Baqir Sadr, (2) Mazhab Mainstream dan (3) Mazhab ALternatif Kritis. Demikianpun, mazhab-mazhab ini memiliki tujuan utama yaitu menunjukkan eksistensi konsep Islam dalam menata perilaku ekonomi manusia. Lihat, MB Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hal. 89-92



membandingkan konsep kebijakan moneter konvensional dan Islam serta implementasi kebijakan moneter Islam di beberapa negara.

## **B. Pengertian Kebijakan Moneter**

### **1. Kebijakan Moneter Dalam pandangan konvensional**

Kebijakan moneter<sup>7</sup> adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Bank Sentral.<sup>8</sup> Kebijakan ini ditempuh melalui pengendalian jumlah uang beredar dan lembaga-lembaga keuangan (khususnya perbankan). Dengan demikian, wewenang penentuan dan pelaksanaan kebijakan moneter berada di bank sentral; dan pemegang otoritas tertinggi dalam kebijakan moneter adalah gubernur bank sentral. Instrumen-instrumen yang dimainkan adalah tingkat suku bunga, pengaturan perbankan dan jumlah uang beredar di masyarakat (money supply).

Dalam hal kebijakan moneter ini, Bank Sentral dapat memilih salah satu namun tidak terbatas pada instrumen kebijakan moneter yang ada yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Kebijakan moneter dilakukan dalam upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut bank sentral akan terus berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.<sup>9</sup>

### **2. Jenis Kebijakan Moneter**

<sup>7</sup> Dalam kajian ekonomi makro, selain kebijakan moneter juga dibahas mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan ini ditempuh melalui pengendalian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Instrumen-instrumen yang dimainkan adalah pos-pos pendapatan dan pos-pos pengeluaran (*revenue items and expenditure items*) di dalam anggaran keuangan negara, utamanya pajak dan subsidi. Wewenang penentuan dan pelaksanaan kebijakan fiskal berada di departemen keuangan; dengan demikian, pemegang otoritas tertinggi dalam hal kebijakan fiskal adalah menteri keuangan.

<sup>8</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta, RajaGrafindo, 1998), cet. 9, hal. 233

<sup>9</sup> <http://www.wikipedia.com>



Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : (1) Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dan (2) kebijakan moneter yang bersifat kualitatif. Untuk penjelasan kedua jenis kebijakan moneter ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 2.1. Kebijakan moneter kuantitatif

Kebijakan moneter kuantitatif dapat dibedakan menjadi tiga kebijakan yaitu :

- i. Melakukan jual beli surat berharga di dalam pasar surat-surat berharga
- ii. Membuat Perubahan Ke Atas Tingkat Diskonto Dan Tingkat Bunga Yang Harus Dibayar Oleh Bank-Bank Umum
- iii. Membuat perubahan ke atas tingkat cadangan minimum (*reserve requirement*) yang harus disimpan oleh bank-bank umum

### 2.2. Kebijakan Moneter Kualitatif

Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

- i. Pengawasan pinjaman secara selektif yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan/dikembangkan
- ii. Pembujukan secara moral, yaitu bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan bank umum untuk meminta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu.

## 3. Pengaruh Kebijakan Moneter Dalam Kegiatan Ekonomi

Pertanyaan yang layak kita ajukan adalah bagaimana peran kebijakan moneter dalam mengendalikan kegiatan ekonomi ke arah yang lebih baik yaitu untuk mencapai kegiatan ekonomi yang tinggi (dan tingkat pengangguran yang rendah) tanpa inflasi.

Rangkaian kebijakan moneter yang dijalankan dengan baik akan menimbulkan beberapa rangkaian perubahan dalam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan perubahan pendapatan nasional dan penggunaan tenaga kerja. Rangkaian perubahan yang berlaku itu dinamakan mekanisme transmisi.



Mekanisme ini menggambarkan rangkaian perubahan yang akan berlaku akibat dari kebijakan moneter yang dijalankan. Mekanisme ini dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\Delta r \rightarrow \Delta I \rightarrow \Delta AE \rightarrow \Delta Y$$

Penjelasan :

1. Kebijakan moneter akan merubah tingkat bunga ( $\Delta r$ )
2. Perubahan tingkat bunga akan merubah investasi ( $\Delta I$ )
3. Perubahan investasi akan merubah perbelanjaan agregat ( $\Delta AE$ )
4. Perubahan belanja agregat akan merubah pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ) dan penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian

Dengan demikian keefektifan dari kebijakan moneter sangat tergantung kepada sifat perubahan tiga variabel yaitu : tingkat bunga, tingkat investasi dan pengeluaran agregat.

Secara teori, kebijakan moneter dapat ditransmisikan melalui berbagai jalur (*channel*), yaitu jalur suku bunga, jalur kredit perbankan,<sup>10</sup> jalur neraca perusahaan, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Dengan melewati jalur-jalur tersebut, kebijakan moneter akan ditransmisikan dan berpengaruh ke sektor finansial dan sektor riil setelah beberapa waktu lamanya (*lag of monetary policy*).<sup>11</sup>

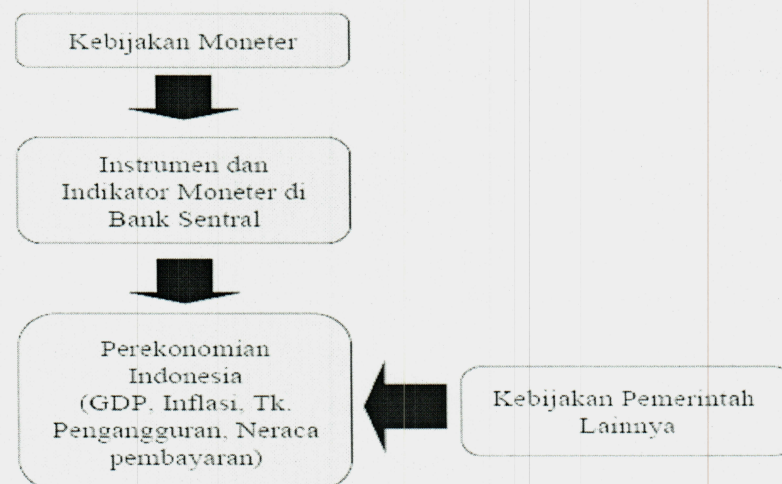
<sup>10</sup> Beberapa analisis empiris telah dilakukan untuk melihat efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter, terutama melalui jalur kredit perbankan. Dalam analisis itu dinyatakan bahwa bank dengan kapitalisasi lebih rendah ternyata lebih cepat dalam merespon kebijakan moneter, sementara karakteristik bank menurut ukuran dan likuiditas disimpulkan tidak berpengaruh terhadap efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit. Lihat, Farinha, Luisa, and Carlos Robalo Marquez, *The Bank Lending Channel of Monetary Policy: Identification and Estimation Using Portuguese Micro Bank Data*, Working Paper European Central Bank, December 2001, hal. 120

<sup>11</sup> Untuk kasus Indonesia, mengingat tugas spesifik yang diemban oleh Bank Indonesia, BI tidak sepenuhnya dapat mengendalikan inflasi, terutama tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran (*cost push inflation*). Bank Indonesia, melalui kebijakan moneter, hanya dapat mempengaruhi inflasi dari sisi permintaan, seperti investasi dan konsumsi masyarakat. Misalnya, kebijakan kenaikan suku bunga dapat menge-'rem' pengeluaran masyarakat dan pemerintah sehingga dapat menurunkan permintaan secara keseluruhan yang pada akhirnya dapat menurunkan inflasi. Selain itu, kenaikan suku bunga ini dapat menguatkan nilai tukar melalui peningkatan (*positive*) *interest rate differential*. Demikian juga, Bank Indonesia dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat melalui kebijakan yang konsisten dan kredibel.

Selain kebijakan moneter yang bersifat "langsung" seperti di atas, bank sentral juga dapat mempengaruhi tujuan akhirnya secara "tidak langsung", yaitu melalui berbagai regulasi dan himbauan (*moral suasion*) kepada sektor perbankan guna mempercepat mekanisme transmisi kebijakan moneter.

Dalam melaksanakan pengendalian moneter Bank Indonesia diberikan kewenangan dalam menggunakan instrumen moneter berupa tetapi tidak terbatas pada (i) Operasi Pasar Terbuka (*open market operation*), (ii) penetapan tingkat diskonto (*discount rate*), (iii) penetapan Giro Wajib Minimum (*minimum reserve requirement*), dan (iv) pengaturan kredit atau pembiayaan.<sup>12</sup>

Dalam makalah ini akan dikemukakan contoh skema transmisi kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi Indonesia.<sup>13</sup>



Gambar di atas menunjukkan bahwa melalui instrumen (Operasi pasar terbuka, tk. Diskonto, cadangan minimum, himbauan, dll) serta indikator moneter (tk. Bunga, jumlah uang beredar), kebijakan di bidang moneter akan mempengaruhi perekonomian, yang terlihat dari perubahan pendapatan nasional (GDP), tingkat inflasi, jumlah pengangguran dan neraca pembayaran). Meskipun demikian, kebijakan pemerintah lainnya juga turut mempengaruhi beberapa indikator perekonomian Indonesia tersebut.

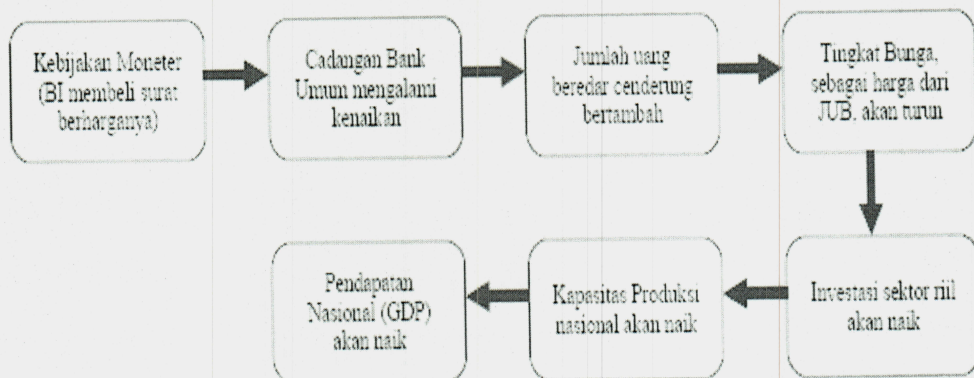
<sup>12</sup> <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflation+Targeting/Peran+Kebijakan+Moneter/>

<sup>13</sup> <http://www.arisbudi.staff.gunadarma.ac.id>

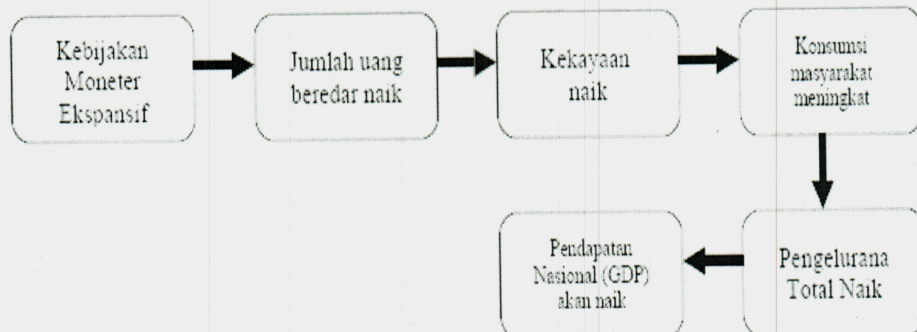


Jumlah uang beredar merupakan salah satu indikator kebijakan moneter yang sangat penting dan memiliki peranan yang besar karena dampak langsungnya pada perekonomian Indonesia. Dampak tersebut terjadi melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter, seperti dijelaskan berikut ini.<sup>14</sup>

a. Jalur Biaya Modal

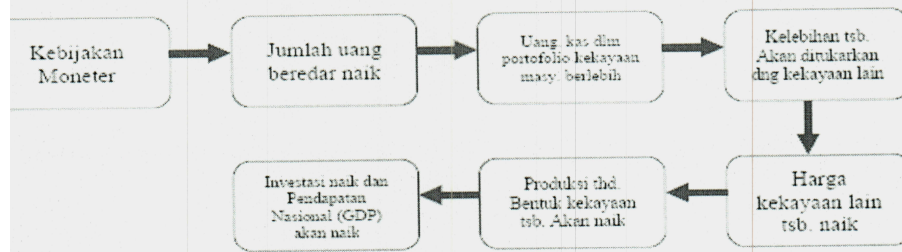


b. Jalur Kekayaan

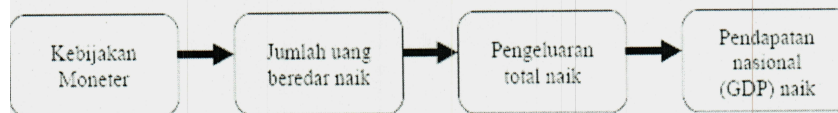


c. Jalur Harga Relatif

<sup>14</sup> Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan jalur yang dilalui instrumen kebijakan moneter dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Jalur-jalur tersebut antara lain jalur suku bunga (*traditional interest rate effect*), jalur harga aset lainnya (*other asset price effect*), dan jalur kredit (*credit view*). Lihat, Mishkin, Frederic S., *The Economics of Money, Banking, and Financial Market*, (Pearson The Addison-Wesley, 2004) 7th Ed, hal.78



#### Jalur Langsung



### Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Islam

#### .. Sejarah Kebijakan Moneter Islam

Sebelum dijelaskan mengenai bagaimana konsep Islam mengenai kebijakan moneter, perlu dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sejarah perkembangan sistem moneter dari sejak jaman Rasul sampai saat ini.

Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengutamakan suku bunga. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Perekonomian Jazirah Arabia ketika itu adalah perekonomian dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam; Minyak bumi belum ditemukan dan sumber daya alam lainnya terbatas.<sup>15</sup>

Lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab dikenal sebagai Jalur Dagang Selatan. Sedangkan antara Romawi dan Persia disebut Jalur Dagang Utara. Sedangkan antara Syam dan Yaman disebut Jalur Dagang Utara-Selatan.

<sup>15</sup> <http://www.cybermq.com/index.php?artikel/detail/3/304/artikel-304.html>



Perekonomian Arab di zaman Rasulullah SAW, bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab.

Dinar dan Dirham juga dijadikan alat pembayaran resmi. Sistem devisa bebas diterapkan, tidak ada halangan sedikit pun untuk mengimpor dinar dan dirham. Transaksi tidak tunai diterima luas dikalangan pedagang. Cek dan promissory notes lazim digunakan. Misalnya Umar Ibnu-Khaththab ra. Beliau menggunakan instrumen ini untuk mempercepat distribusi barang-barang yang baru diimpor dari Mesir ke Madinah.

Instrumen *factoring* (anjak piutang) yang baru populer tahun 1980-an, telah dikenal pula pada masa itu dengan nama *al-hiwalah*, tapi tentunya bebas dari unsur bunga.

Apabila para pedagang mengekspor barang, berarti dinar/dirham diimpor. Sebaliknya, bila mereka mengimpor barang. Berarti dinar/dirham diekspor. Jadi dapat dikatakan bahwa keseimbangan *supply* dan *demand* di pasar uang adalah *derived market* dari keseimbangan *aggregate supply* dan *aggregate demand* di pasar barang dan jasa.

Nilai emas dan perak yang terkandung di dalam dinar dan dirham, sama dengan nilai nominalnya. Sehingga dapat dikatakan penawaran uang elastis sempurna terhadap tingkat pendapatan. Tidak ada larangan impor dirham dan dinar berarti penawaran uang elastis.

Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi perhiasan emas dan perak. Tidak terjadi kelebihan penawaran atau permintaan sehingga nilai uang stabil.

Beberapa hal di bawah ini dilarang dengan tujuan untuk menjaga kestabilan:

1. Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan untuk berjaga-jaga.

2. Penimbunan mata uang, sebagaimana dilarangnya penimbunan barang. Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 34-35,<sup>16</sup>
3. Transaksi talaqqi rukban, yaitu mencegat penjual dari kampung diluar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga. Distorsi harga ini merupakan cikal bakal spekulasi.
4. Transaksi *kali bi kali*, yaitu bukan transaksi tidak tunai. Inilah indahnya Islam. Transaksi tunai diperbolehkan, namun transaksi *future* tanpa ada barang dilarang. Transaksi maya ini merupakan salah satu pintu riba.
5. Segala bentuk riba dilarang, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 278, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Menurut Muh. Diya al-Din al-Rais, pada masa Rasulullah telah digunakan *bimetallic standard* yaitu emas dan perak (dinar dan dirham). Nilai tukar kedua mata uang ini relatif stabil dengan kurs dinar-dirham 1:10. namun demikian, stabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya pada masa pemerintahan Umayyah (41/662-132/750) dimana rasio kurs dinar dirham adalah 1:12, sedangkan pada Abbasiyah (132/750-656/1258) berada pada kisaran 1:15.<sup>17</sup>

Bahkan nilai tukar dinar dan dirham terendah pernah terjadi yaitu 1:35 sampai 1:50. Instabilitas nilai tukar ini mengakibatkan terjadinya *bad coins to drive good coins out of circulation*<sup>18</sup> atau uang kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik, atau sering disebut hukum Gresham dalam literatur konvensional. Hal ini pernah terjadi pada masa Bani Mamluk (1263-1328), dimana mata uang logam yang beredar terbuat dari fulus (tembaga) mendesak

<sup>16</sup> Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

<sup>17</sup> Muh Diya al-Din al-Rais, *Al-Kharaj wa al-Nuzum al-Maliyya li al-Dawlah al-Islamiyyah*, (Cairo: Al-Maktabah al-Angelo al-Misriyah, 1961), cet. 2. hal. 369

<sup>18</sup> Misri, Rafiq, *Al-Islam wa al-Nuqud*, (Jeddah : Markaz al-Nashr al-Ilmi K.Ig Abdul Aziz University, 1990), cet. 2.



keberadaan uang logam emas dan perak. Peristiwa ini terjadi bila uang dari jenis dinar (emas) dan dirham (perak) menghilang dari peredaran karena adanya perbedaan nilai kurs dengan daerah lain. Sebagai contoh jika kurs di wilayah Mamluk adalah 1:20 (yaitu satu emas sebanding dengan 20 fulus) sedangkan daerah lain adalah 1:25, maka emas yang berada di wilayah Mamluk akan dibawa ke daerah lain yang akan dapat ditukarkan dengan 25 fulus, tentu saja perbedaan nilai ini akan mengakibatkan emas diperdarakan akan hilang. Ibn Taimiyyah menyebutkan bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang kualitas baik.

Perkembangan inipun terus mengalami evolusi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:<sup>19</sup>

- a. *The gold standard*: dimana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran
- b. *The gold bullion standard*: dimana logam emas bukanlah alat tukar yang beredar namun otoritas moneter menjadikan logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang beredar.
- c. *The gold exchange standard (Bretton Wood System)* dimana otoritas moneter menentukan nilai tukar *domestic currency* dengan *foreign currency* yang mampu di-back up secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang *fiducier (credit money)* yaitu uang yang keberadaannya tidak di back up oleh emas dan perak.

Adapun mengenai keharusan untuk menggunakan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai standar nilai tukar (*full bodied monometallic standard*), maka tidak ditemukan secara spesifik dalam Alquran dan Sunnah. Khalifah Umar bin Khattab (23/644) telah mencoba untuk memperkenalkan jenis mata uang dari kulit binatang (unta).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Adiwarman A. Karim, ekonomi Makro Islami, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 178

<sup>20</sup> Lihat kesimpulan buku Dr. Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami : Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Terj. Al-Auraq al-Naqdiyah fi Al-Iqtisad al-Islamiy, (Jakarta : RajaGrafindo, 2004), hal. 326

Oleh beberapa fuqaha uang *fiducier* ini juga mendapat dukungan seperti oleh Ahmad Ibn Hanbal (241/855), Ibn Hazm (456/1064) dan Ibn Taimiyyah (505/1328). Merujuk dari pendapat para fuqaha ini tidak ditemukan akan keharusan memakai emas dan perak sebagai alat pembayar, walaupun pada masa itu keberadaan *full bodied money* merupakan sebuah kelaziman. Namun, disamping membolehkan uang *fiducier*, Ibn Taimiyyah mengingatkan bahwa penggunaan uang ini akan mengakibatkan hilangnya uang dinar dan emas dari peredarannya karena adanya hukum *Gresham*. Iman al-Ghazali (1058-1111M) membolehkan penggunaan uang yang tidak dikaitkan dengan emas atau perak selama pemerintah mampu menjaga nilainya.

Al-Ghazali juga menyatakan bahwa pemerintah yang mensyaratkan uang *fiducier* sebagai alat pembayaran yang sah harus menjaga nilainya dengan mengatur jumlah yang beredar sesuai dengan kebutuhan dan memastikan tidak adanya perdagangan uang.

#### c.2. Larangan Bunga dan Konsep Islam Mengenai Uang

Menurut Chapra<sup>21</sup>, manajemen moneter yang berdasarkan bunga tidak akan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi tersebut. Berbagai literatur yang ditulis oleh para ekonom seperti Muslehudin (1974), Qureshi (1979), Kahf (dalam Khursid, 1981), Siddiqui (1981), Chapra (1985 dan 1996), Allais (1993), Mills dan Presley (1997) serta Choudhury dan Mirakhor (1997) tidak menyetujui perekonomian yang bertumpu pada bunga. Kebijakan bunga akan menimbulkan alokasi sumber dana tidak efektif dan efisien (*misallocation of resources*), yang pada gilirannya cenderung akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam sistem ekonomi. Lebih jauh lagi Enzler, Conrad dan Johnson dalam Chapra (1996) menemukan bukti bahwa *misallocation of capital stock* telah terjadi di Amerika Serikat, negara yang sangat mengagungkan suku bunga sebagai alat untuk melakukan *indirect screening mechanism* (Siregar, 1999). Krisis keuangan dalam

---

<sup>21</sup> Chapra, Muhammad Umer, *Monetary Policy in An Islamic Economy in Money and Banking in Islam*, (Jeddah :International Centre for Research in Islamic Economics, 1996,), hal. 200



*subprime mortgage* menunjukkan semakin lemahnya sistem keuangan berbasis pada bunga.<sup>22</sup>

Selain larangan bunga, maka Islam juga mendekonstruksi peranan uang dalam kegiatan ekonomi. Sebagaimana kita maklumi bahwa sebagai gejala moneter belakangan ini melahirkan kesadaran akan perlu adanya redefinisi, reinterpretasi dan reposisi uang sebagaimana fungsi dan hakekatnya, sehingga kebijakan dan perilaku pasar yang berkait dengannya akan berbuah kemakmuran dan kemajuan ekonomi bukan sebaliknya berupa kesengsaraan dan krisis ekonomi akibat penjungkirbalikan paradigma dan visi tentang uang itu sendiri. Perdagangan valuta yang cenderung mengarah kepada spekulasi yang memanfaatkan rumor-rumor politik untuk mengeruk keuntungan sempit sesaat yang dapat merugikan sendi-sendi perekonomian secara makro menggambarkan sebuah distorsi terhadap paradigma tentang uang dan fungsi substansialnya.

Dalam literatur ekonomi Islam, uang dibahas sebagai salah satu alat transaksi, perantara untuk menilai barang dan jasa, dan ia tidak boleh memainkan peranan sebagai barang. Akibat langsung dari penggunaan uang sebagai ukuran harga adalah kondisi dimana kuantitasnya mempengaruhi berbagai transaksi. Hal ini sudah menjadi pokok bahasan dalam literatur ke-Islaman, baik yang kuno maupun yang modern. Ibnu Khaldun dalam kitab *Muqaddimah* menegaskan bahwa dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan barang. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya. Menurutnya, kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif.

Menurut Imam Ghazali bahwa adanya uang sebagai ukuran nilai suatu barang maka uang akan berfungsi sebagai media penukaran. Uang diciptakan

---

<sup>22</sup> Arif Pujiyono, *Teori Endogenus Uang dalam Sistem Moneter Islam (Evaluasi terhadap Ketidakadilan Bunga sebagai Instrumen Kebijakan Moneter dalam Sistem Kebijakan Moneter Konvensional)*, makalah dalam Seminar dan Simposium Internasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 1-3 Agustus, UNAIR, Surabaya

untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Artinya uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang dan jasa. Atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan uang tidak memiliki kegunaan langsung. Hanya, bila uang itu digunakan untuk membeli barang maka barang itu akan memberi kegunaan. Dalam teori ekonomi neo-klasik dikatakan kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung.

Dalam konsep Islam menurut Monzer Kahf (1979) bahwa permintaan uang terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk kegiatan yang bersifat spekulatif. Uang adalah milik masyarakat, oleh karena itu manusia dilarang untuk menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, karena akan mengakibatkan berkurangnya jumlah uang beredar. Menurut Islam, uang merupakan *flow concept*, maka uang harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian berarti akan semakin banyak transaksi yang terjadi, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara singkat uang harus digunakan untuk transaksi-transaksi yang menghasilkan barang dan jasa.

Islam tidak mengenal konsep *time value of money*, karena konsep ini melihat bahwa dengan berlalunya unsur waktu, uang akan bertambah walaupun tanpa melakukan apa-apa terhadap uang tersebut. Pemilik uang akan memperoleh suku bunga karena selama penantiannya dalam jangka waktu tertentu, uang yang dimiliki saat ini akan bertambah di belakang hari. Sebaliknya menurut Rahman (1995) Islam justru mengenal konsep *money value of time*, yaitu waktu memiliki nilai uang atau nilai ekonomi. Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bekerja dan berusaha akan menghasilkan pendapatan yang dapat dinilai dengan uang. Dapat juga dijelaskan bahwa bila waktu yang tersedia digunakan untuk memutar uang dalam kegiatan usaha dapat memberikan tambahan uang yang dimiliki. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada konsep yang terdahulu fokusnya ada pada penambahan nilai uang dengan berlalunya waktu, sedangkan



konsep yang terakhir penambahan uang dapat terjadi karena waktu yang tersedia dipakai untuk memutar uang dengan berusaha.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa uang merupakan *flow concept*, yaitu uang harus berputar dalam perekonomian untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Untuk dapat memanfaatkan atau memutar uang untuk menghasilkan sesuatu, maka diperlukan keahlian dalam memproduksi barang dan jasa. Masalahnya adalah tidak semua orang memiliki keahlian dan waktu untuk memproduksi., karena keterlibatannya dalam kegiatan sebagai pekerja yang memperoleh hasil dalam bentuk/pendapatan yang dapat diukur dengan uang. Maka bagi pelaku ekonomi seperti ini dapat mempercayakan uang yang dimilikinya kepada yang memiliki keahlian dalam memproduksi sesuatu. Ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan yaitu :

- ❖ Ber-*musyarakah* atau *mudharabah* adalah dengan menempatkan uangnya (dana) pada orang yang mempunyai keahlian produksi barang dan jasa (mudharib) untuk memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Dengan cara ini mudharib tidak menjanjikan sejumlah persentase tertentu dari uang yang ditempatkan oleh pemilik dana, melainkan yang diperjanjikan adalah bila mudharib memperoleh untung, pemilik dana akan memperoleh persentase tertentu dari keuntungannya. Oleh karena itu pemilik dana menghadapi resiko usaha bila mudharib mengalami kerugian, sehingga pemilik dana bisa jadi tidak mendapat imbalan apa-apa atau bahkan kehilangan dana yang diputar oleh mudharib.
- ❖ Bila mereka tidak mau mengambil resiko berbagi hasil, maka pemilik dana dapat meminjamkan dananya kepada orang yang memiliki keahlian yang berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa imbalan apapun. Hal ini dikenal dengan *qard* yang merupakan prinsip pinjam meminjam dalam Islam. Ditinjau secara mikro, *qard* tidak memberikan manfaat langsung kepada pemilik dana. Namun ditinjau secara makro, *qard* merupakan tambahan uang beredar yang digunakan untuk transaksi, yang pada gilirannya akan

mengakibatkan perputaran uang akan semakin cepat yang dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan nasional pemilik dana secara tidak langsung dapat merasakan manfaat qard.

- ❖ Ber-shadaqah adalah dengan memberikan dananya kepada orang yang memerlukan, dimana pemakai dana tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut. Dampaknya secara mikro maupun makro sama dengan qard.

### c.3. Instrumen Moneter Islam

Umer Chapra mengungkapkan tiga sasaran utama dari kebijakan moneter yang ada dalam ekonomi Islam yaitu :<sup>23</sup>

1. Tenaga Kerja Penuh dan pertumbuhan ekonomi (*full employment and economics growth*)
2. Keadilan sosio ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*Socio economic justice and equitable distribution income and wealth*)
3. Stabilitas nilai uang (*stability in the value of money*)

Sesuai dengan ajaran Islam manajemen moneter yang efisien dan adil tidak berdasarkan mekanisme suku bunga, melainkan dengan menggunakan strategi yang berdasarkan tiga instrumen utama.

#### 1. *Value judgments*

Instrumen yang pertama adalah *value judgments* yang dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi *resources* yang sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya *resources* merupakan amanah dari Allah yang pemanfaatannya harus efisien dan adil. Berdasarkan nilai-nilai Islam, *money demand* harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, sama sekali bukan untuk *conspicuous consumption*, pengeluaran-pengeluaran non produktif dan spekulatif.

#### 2. Kelembagaan

---

<sup>23</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh Ali Sakti, *Analisis Teoritis, Ekonomi Islam : Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Aqsa Publishing, 2007) hal. 264



Instrumen yang kedua adalah kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi dan politik, yang salah satunya adalah mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan resources. Walaupun mekanisme harga tidak menjamin pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara, namun disadari sepenuhnya bahwa mekanisme harga yang disertai dengan nilai-nilai sistem yang ada dapat memudahkan pencapaian tujuan.

### 3. *Finacial Intermediation* berlandaskan sistem *profit and loss sharing*

Dalam sistem ini *money demand* dialokasikan dengan syarat hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Dengan persyaratan seperti itu, diharapkan dapat meminimisasi *money demand* untuk pemnafaatan yang tidak berguna, non-produktif dan spekulatif. Selain daripada itu, persyaratan tersebut dapat menciptakan masyarakat yang memiliki *entrepreneurship* sekalipun diantara golongan miskin, sedangkan golongan kaya dapat berkontribusi sehingga para *entrepreneur* tersebut dapat menghasilkan output, perluasan kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Persyaratan pemanfaatan *money demand* yang sedemikian rupa juga berlaku bagi sektor pemerintah, sehingga kreditor akan mempertimbangkan kelayakan proyek dan kemampuan pemerintah mengelola proyek tersebut. Dengan persyaratan tersebut, pemerintah tidak akan dapat memperoleh pembiayaan yang berlebihan yang digunakan untuk proyek-proyek publik yang tidak menguntungkan. Aplikasi dari persyaratan tersebut, cenderung dapat menciptakan kesulitan-kesulitan jangka pendek, namun untuk jangka panjang dapat mengurangi ketidak seimbangan anggaran maupun makro-ekonomi, serta dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik.

Oleh karena konsumsi untuk kebutuhan pokok dan investasi yang lebih stabil dibandingkan konsumsi yang tidak bermanfaat dan investasi yang spekulatif, maka pemanfaatan *money demand* untuk hal-hal yang disebutkan terdahulu akan lebih stabil dalam perekonomian Islam.

Adiwarman A. Karim menyebutkan bahwa berkaitan dengan kebijakan moneter Islam, ekonomi Islam terbagi ke dalam 3 (tiga) mazhab yaitu :<sup>24</sup>

### 1. Mazhab Pertama (*iqtisaduna*)

Mazhab ini dipelopori oleh Dr. Karim Sadr, Dr. Baqir Sadr dan Dr. Abbas Mirakhor. Menurut mazhab ini, jumlah uang beredar tidak akan mampu dipengaruhi oleh pemegang otoritas moneter. Pendapat ini didukung dengan refleksi ekonomi pada masa Rasul. Keadaan ekonomi pada masa rasul yaitu :

1. Tidak ada satupun otoritas moneter yang mampu mengendalikan uang beredar.
2. Uang yang beredar adalah dinar dan dirham. Permintaan terhadap dinar dan dirham ditentukan oleh banyaknya perdagangan luar negeri
3. Tidak ada pengenaan bea masuk barang mpor maupun uang impor.

Ketika terjadinya hiaz / hoarding (penimbunan barang ), maka pemerintah melakukan penentuan harga pasar sehingga penimbun barang akan mengeluarkan barangnya.

### 2. Mazhab Kedua (Mainstream)

Mazhab ini dipelopori oleh Metwally, yang mengatakan bahwa penawaran uang sepenuhnya dikontrol oleh negara sebagai pemegang monopoli penerbitan uang yang sah. Keberadaan baitul mal dianggap prototipe bank sentral saat ini. Keberadaan bank sentral adalah untuk menerbitkan mata uang dan menaga nilai tukarnya agar dapat berada pada tingkat harga yang stabil. Sehingga penawaran uang secara penuh dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral.

### 3. Mazhab Ketiga (Alternatif)

Mazhab ini dipelopori oleh M.A. Choudhury yang menekankan sebuah kebijakan moneter dengan sebuah istilah yang disebut *syuratic process*,<sup>25</sup> yaitu dimana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan

<sup>24</sup> Adiwarman A. Karim, ekonomi Makro Islami, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 225-229

<sup>25</sup> Mazhab ini banyak dipengaruhi pemikiran DR.M.A.Choudhury. Adiwarman A. Karim, ekonomi Makro Islami, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 227



musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Jadi keputusan-keputusan kebijakan moneter yang kemudian dituangkan dalam bentuk instrument moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan di sektor riil.<sup>26</sup>

Dengan demikian, menurut mazhab ini, keseimbangan yang terjadi di sektor moneter adalah derivasi dari keseimbangan yang terjadi di sektor riil, ditambah pula bahwa kebijakan sektor moneter adalah harmonisasi dengan kebijakan di sektor riil.

Menurut mazhab ini, keberadaan uang pada dasarnya terintegrasi dalam system sosial ekonomi yang berlaku. Sehingga value dan jumlah uang dalam sebuah sistem yang kompleks menjadikan uang tidak independent atau bukanlah variable yang exogenous.

Asumsi yang digunakan dalam konsep ini adalah :

1. Terjadinya globalisasi ekonomi menyebabkan bank sentral tidak lagi mampu melakukan pengontrolan secara penuh terhadap jumlah uang beredar. Keberadaan fund manager adalah salah satu contoh bahwa pihak di luar bank sentral juga mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam mempengaruhi level stock uang ada di pasar.
2. Perkonomian mengarah kepada atahap islamisasi sistem keuangannya, sistem ummah sudah mulai diberlakukan dalam sistem perekonomian yang dianut. Sistem ummah yang dimaksud adalah tidak adanya suku bunga dan penggunaan *expected rate of profit* dalam sistem pembiayaan. Sistem ummah ini mengarahkan pada maksimalisasi sumber dana kepada usaha-usaha yang bersifat produktif.

#### **D. Aplikasi Instrumen Moneter Islam di Berbagai Negara**

##### **d.1. Sudan**

Sebelum diberlakukannya syariah Islam pada sistem perbankan di Sudan, Bank Sentral Sudan (BOS) sangat tergantung kepada instrumen-instrumen langsung seperti tingkat suku bunga, plafon kredit (*credit ceiling*), ketentuan

<sup>26</sup> Lihat pula tulisan M.A.Chudhury, *Micro-Money And Real Economic Relationship In The 100 Per Cent Reserve Requirement Monetary System*, dalam <http://faculty.uccb.ns.ca/mchoudhu/chapter27.html>

rasio likuiditas (*statutory liquidity ratio*) dan tingkat dikonto. Pada awalnya, instrument-instrumen tersebut sangat efektif karena perekonomian Sudan mempunyai karakteristik yaitu system finansial yang non-kompetitif, pasar modal primer dan sekundere yang belum berkembang, serta kelangkaan modal. Namun, karena instrument-instrumen langsung tersebut mengakibatkan distorsi dari alokasi sumber daya bank, interferensi terhadap mekanisme harga, pembatasan kredit, serta misalokasi dan distorsi dari kompetitif akibat penerapan batasan-batasan pada manajemen asset bank. Pada akhirnya, BOS lebih memilih untuk memakai instrument-instrumen tidak langsung.

Setelah diperkenalkannya syariah Islam pada tahun 1984 di Sudan, maka BOS mengeluarkan arahan dan perintah kepada seluruh bank yang beroperasi di Sudan agar menjalankan prinsip-prinsip perbankan kepada seluruh bank yang beroperasi di Sudan agar menjalankan prinsip-prinsip syariah. Akibatnya, BOS juga juga dihadapkan pada permasalahan substitusi instrument moneter konvensional dengan instrument moneter yang sesuai dengan syariah dan dapat mempertahankan perannya sebagai pengawas dan pemberi arahan bagi bank-bank melakukan ekspansi atau kontraksi penawaran uang atau kredit dan mengimplementasikan kebijakan moneter serta sekaligus menjaga kepentingan publik.

Adapun instrumen-instrumen moneter yang merupakan ciri khas BS adalah :<sup>27</sup>

1. Margin minimum untuk perjanjian murabahah (berkisar antara 10%-50%) terantung pada sektor dan mata uang yang digunakan.
2. Seluruh kredit harus dipastikan (melalui bagian legal) mematuhi ketentuan syariah.
3. Central Bank Musharaka Certificate (CMC) dimana fungsi dari sekuritas Bank Sentral konvensional sebagai pengendali likuiditas uang terpenuhi dengan keberadaan sekuritas yang berdasarkan system bagi hasil (yang sesuai syariah)

---

<sup>27</sup> Lihat selengkapnya di <http://www.cbos.gov.sd/english/policye.htm>



4. Government Musharaka Certificate (GMC) yaitu instrument yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengumpulan dana melalui penerbitan sekuritas yang menjanjikan pada investor suatu pengembalian yang dinegosiasikan sebelumnya atas dasar investasi mereka pada kumpulan asset pemerintah yang berbentuk kepemilikan pada perusahaan-perusahaan public
5. *Ijara Certificate (Sukuk)* yaitu sekuritas yang dimaksudkan untuk memobilisasi simpanan jangka pendek yang digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur jangka panjang yang dilakukan melalui sekuritisasi asset pemerintah berwujud seperti lapangan terbang, jalan raya, bangunan, pabrik, rumah sakit, pembangkit listrik dan sebagainya.

#### **d.2. Iran**

Adapun instrumen-instrumen moneter yang khas dipakai oleh otoritas moneter Iran adalah penggunaan instrumen *discount rate* yang tidak seluas sistem perbankan konvensional. Namun karena Bank Sentral adalah "*lenders of the last resort*" dan juga "*ultimate of liquidity*", maka bank sentral Iran seharusnya menyediakan likuiditas pada saat dimana bank-bank sangat membutuhkannya, sehingga berdasarkan mazhab pertama (*iqtisaduna*) menganggap bahwa discounting sekuritas yang didasarkan pada transaksi riil diperbolehkan), maka instrumen ini diperbolehkan.<sup>28</sup>

#### **3. Indonesia**

Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi bank sentralnya terhadap bank-bank syariah mempunyai instrumen-instrumen sebagai berikut :

1. Giro Wajib Minimum (GWM) yang biasa juga dinamakan statutory reserve requirement yaitu simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI berdasarkan prosentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, besaran GWM ini besarnya adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk IDR (rupiah) dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata harian dalam satu masa laporan

---

<sup>28</sup> Lihat selengkapnya di <http://www.cbi.ir/section/1370.aspx>

untuk periode dua masa laporan sebelumnya. Sedangkan dana pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah, Deposito Investasi Mudharabah dan kewajiban lainnya

2. Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah (Sertifikat IMA), yaitu suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari yang diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan standar yang ditetapkan oleh bank Indonesia (BI). Pembayaran akan dilakukan oleh bank syariah penerbit sebesar nilai nominal ditambah imbalan bagi hasil (yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya dengan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia atau transfer elektronik.
3. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS),<sup>29</sup> yaitu surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS merupakan instrumen bank Indonesia yang sesuai dengan syariah yang digunakan dalam OMO (*Open Market Operations*), selain itu SBIS juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek.

#### **E. Penutup**

Dalam kebijakan moneter konvensional instrumen moneter yang dijadikan alat kebijakan moneter terutama ditujukan untuk mengendalikan uang beredar (*money supply*), baik perorangan, masyarakat maupun kelompok usaha. Dengan kebijakan moneter dimana instrumen utamanya adalah bunga, maka akan mampu mengendalikan preferensi si pemilik dana untuk tidak bermain di pasar keuangan sehingga diharapkan kemudian terjadi kestabilan ekonomi (*equilibrium*).

Sedangkan kebijakna moneter dalam Islam secara alami tidak akan memiliki kecendrungan seperti konvensional dimana dalam sistem Islam tidak

---

<sup>29</sup> Lihat, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/ 11 /PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

diperkenankan praktek-praktek spekulasi dan menganjurkan perilaku konsumsi yang moderat (hemat). Inti untuk mendukung praktek ini adalah dengan dihapusannya bunga dari kegiatan ekonomi. Dengan demikian tidak ada kecendrungan *money creator* melalui sektor perbankan yang kemudian menggelembungkan jumlah uang dimana semakin memperbesar ketimpangan antara sektor riil dan moneter.

Ketiadaan bunga akan menghilangkan rangsangan bagi pemegang dana untuk menahan dana mereka di sektor keuangan. Intinya, dengan kebijakan moneter yang ada, maka sumber daya ekonomi akan mampu merangsang kegiatan ekonomi secara riil.